

EKUITAS
Akreditasi No.55a/DIKTI/Kep/2006

ISSN 1411-0393

PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN BARRU MELALUI KLASTER PENANGKAPAN IKAN LAUT

Supomo

Peneliti Bidang “Ekonomi Regional dan Kota” di PKT, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta

ABSTRACT

As the emergence of regional autonomy commenced in the early 2001, the local government is expected not to repeat the central government's inappropriate management by setting its development priorities. The first priority is to create development system which puts emphasis on the basic economy (people's basic economy). The second priority is to develop of local leading products from local resources. The third priority is to develop agri-bussiness. The last priority is to establish modern industries based on the local leading products from local resources.

In that case the local government of Barru has began to develop the sea fishing catchment cluster. By this cluster model, all of existing stakeholders are involved, until each of them knows their appropriate roles in the system. By developing entrepreneurship, mastering the science and technology, and the empowerment by the local government, it is expected that the sea fishing catchment cluster in the sea cluster could grow stronger.

Key words: territory outonomy, regional development, basic of people's economic, cluster of sea fish catchment.

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang berlaku mulai awal tahun 2001 ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam Pasal 7 dalam UU nomor 22 tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa: (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang: perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga

perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah juga mempunyai makna strategis, yaitu mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan mengutamakan kondisi wilayah. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan daerah (wilayah) dengan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur negara, baik aparatur kelembagaan maupun sumberdaya manusianya. Peran pemerintah pusat akan diprioritaskan pada fungsi perumusan kebijakan nasional, perencanaan nasional, pelayanan vital, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operasional dan pelayanan masyarakat diserahkan kepada daerah otonomi.

Apabila dikaitkan dengan teori dua sistem pembangunan yaitu sistem pembangunan sektoral dan regional dimaksud, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah ini maka pembangunan dengan sistem regional (wilayah) akan lebih berkembang daripada sistem pembangunan sektoral. Dengan berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah maka pembangunan daerah atau wilayah menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah Kabupaten atau Walikota setingkat kabupaten. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut yang mengetahui karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing, baik sumberdaya alamnya, kemampuan sumberdaya manusia, kapabilitas masyarakat dan dunia usaha, produk unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan, maupun basis ekonomi rakyat di wilayah masing-masing.

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah hanya dapat dicapai apabila daya saing produk unggulan daerahnya dapat ditingkatkan. Kemampuan Daya saing bisa dicapai melalui kemampuan inovasi dan lingkungan persaingan dalam masyarakat. Agar dalam masyarakat tercipta kondisi demikian pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan pada faktor internal dan eksternal. Salah satu caranya adalah melalui klaster industri.

Khususnya wilayah Kabupaten Barru (termasuk Propinsi Sulawesi Selatan) yang sebagian wilayahnya berupa wilayah pesisir sepanjang 87 km, maka basis ekonomi rakyat di wilayah ini adalah sektor perikanan laut, selain sektor pertanian di wilayah pedalaman. Perikanan laut di sini di dalamnya termasuk: (a) budidaya ikan, udang, dan rumput-laut di laut, (b) Budidaya tambak-tambak: udang, bandeng dan rumput laut; dan (c) penangkapan ikan di laut. Dengan pengembangan sektor kelautan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah berusaha melaksanakan amanat pembangunan masyarakatnya melalui pengembangan wilayah atau daerah dengan mengutamakan basis ekonomi rakyat di wilayah dimaksud.

Program Pengembangan sektor perikanan laut di wilayah Kabupaten Barru akan dilaksanakan dengan klaster perikanan laut yang dapat dikelompokkan dalam sub sektor: (a) budidaya udang, ikan dan rumput laut di pertambakan (b) penangkapan ikan laut; dan (c) budidaya ikan dan rumput laut di laut. Dalam makalah ini penulis hanya membatasi pada analisis klaster penangkapan ikan laut, karena jumlah nelayan yang hidup dari penangkapan ikan di laut tersebut jauh lebih banyak daripada budidaya tambak dan budidaya laut, yaitu nelayan 17.318 orang, petani tambak 5.168 orang, petani ikan laut 122 orang.

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Barru yang terdiri dari daerah pertanian di bagian pedalaman dan daerah perikanan laut di pesisir laut sebelah tepi Barat, maka pertanian dan perikanan laut sudah menjadi basis ekonomi rakyat. Dengan Mengembangkan sektor kelautan melalui klaster penangkapan ikan laut dimaksud, maka permasalahan yang akan dikembangkan dalam artikel ini adalah:

1. Sampai seberapa jauh keberhasilan program kebijakan Pemda Kabupaten Barru bersama *stake-holder* dalam mengembangkan sektor kelautan dengan klaster penangkapan ikan laut sehingga kinerja para nelayan dan petani budidaya tambak dan laut mampu meningkatkan kesejahteraannya.
2. Sampai seberapa jauhkah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mengemban amanat pembangunan daerah (wilayah) Kabupaten Barru dengan mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat.

Tujuan Penulisan

Penulisan masalah “Pengembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Baru Melalui Klaster Penangkapan Ikan Laut” ini dimaksudkan untuk memancing wacana dan perhatian para masyarakat ilmiah dan para pejabat eksekutif dan legislatif daerah yang mempunyai otoritas kebijakan pembangunan wilayah agar konsekwen dengan tugas pembangunan yang sesuai dengan keadaan sumberdaya alam, basis ekonomi rakyat dan sumberdaya manusia di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya bisa mempertimbangkan dan kemudian mengembangkan alternatif masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di pedesaan. Sehingga kelemahan-kelemahan kebijakan pemerintah pusat di masa lalu tidak terulang kembali.

LANDASAN TEORI

Konsep Dan Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Laut Dan Klaster Industri

Pengertian Pengembangan Wilayah

Friedman, 1979 dalam T. Hanafiah (Hanafiah 1985) menyatakan bahwa Pengembangan Wilayah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan ini jelaslah bahwa ruang merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional dan program-program pembangunan wilayah serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu di suatu wilayah atau di suatu lokasi tingkat lokal. Dengan demikian titik tolak daripada perencanaan wilayah adalah berdasarkan konsep ruang.

Konsep ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat secara terpisah, tetapi bila dilihat secara bersama akan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu organisasi tata ruang kegiatan manusia. Unsur-unsur tata ruang yang penting antara lain adalah: jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran atau skala. Unsur-unsur ini secara bersama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah. Dari konsep ruang sebagai dasar perencanaan wilayah tersebut di atas dapat dikatakan bahwa jarak ditentukan secara geometris, seperti ukuran fisik dan ruang absolut yang konkrit di antara titik-titik. Sedangkan lokasi adalah yang absolut dan unik dalam hubungannya dengan lokasi fenomena lain. Selanjutnya yang berhubungan dengan bentuk, ditentukan oleh batas lokasi yang tetap.

Dewasa ini terdapat lima telaahan teori dalam perkembangan teori pembangunan wilayah (Todaro 1991 : 73) yaitu:

1. Teori difusi inovasi dalam tata ruang.
2. Teori yang menyangkut peranan pemerintah dan swasta dalam pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Teori yang menaruh perhatian pada ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Teori yang menelaah tentang peranan kelompok kepentingan (*group interest*) dalam pembangunan wilayah, dan
5. Teori yang menerangkan dampak perubahan organisasi produksi perusahaan dalam menentukan lokasi.

Pada hakekatnya pengembangan wilayah bertujuan untuk menciptakan keadaan di mana tersedia alternatif syah yang lebih banyak bagi setiap anggota masyarakat untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Secara ideal, penciptaan alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi karakteristik masyarakat dengan adanya peningkatan kapasitas produksi, peningkatan rata-rata produktivitas persatuan tenaga kerja, peningkatan

pendapatan, pemerataan distribusi pendapatan, perubahan struktur distribusi kekuasaan di antara golongan-golongan masyarakat ke arah yang lebih adil, transparansi kultural dan tata nilai. Perubahan tersebut haruslah mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat (Lutfi I. Nasution & Ernan Rustiadi, 1992).

Arah kebijakan dan penanganan pengembangan wilayah dapat dibedakan menurut tingkat kemajuan wilayah yaitu: (a). Wilayah yang terlalu maju, (b). wilayah netral, (c). wilayah sedang, (d). wilayah kurang berkembang atau kurang maju, dan (e). wilayah tidak berkembang. Berbeda tingkat kemajuannya dan kondisi wilayahnya, arah kebijakan dan prioritas pembangunannya juga berbeda. Agar berhasil dengan baik, arah kebijakan pengembangan wilayah harus mempertimbangkan potensi unggulan daerah masing-masing terutama kondisi sumberdaya alam, Sumberdaya manusia, dan kultur masyarakat masing-masing wilayah, di samping tingkat kemajuan wilayahnya dimaksud. Potensi sumberdaya alam sebagai aspek pertimbangan dalam faktor produk unggulan daerah di wilayah pedesaan dengan struktur ekonomi pertanian tradisional di sini bisa berupa kecocokan lahan untuk: pertanian, perkebunan, tanaman hutan, atau terdapat bahan mineral bahan tambang, wilayah pesisir laut untuk penangkapan ikan, dll.

Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Demikian juga kandungan mineral yang dimilikinya. Misalnya suatu daerah dengan ketinggian tertentu, dengan curah hujan dan jenis tanah yang baik cocok untuk jenis tanaman tertentu yang produktifitasnya lebih baik daripada daerah lain. Daerah Sukabumi cocok untuk tanaman sayur-mayur. Daerah Temanggung dan Deli cocok untuk tanaman tembakau, Daerah Wonosobo dan Pegunungan Bromo cocok untuk tanaman kentang. Daerah yang bisa diairi oleh irigasi teknis lebih menguntungkan ditanami padi. Daerah NTT cocok untuk peternakan. Sebagian wilayah Aceh dan Kalimantan Timur terdapat sumber minyak bumi, wilayah Tembapapura terkenal dengan tambang tembaganya. Wilayah pesisir pantai mendaya-gunakan laut sebagai penangkapan ikan. Semuanya ini merupakan contoh unggulan daerah karena sumberdaya alamnya.

Potensi unggulan daerah berupa Sumberdaya manusia untuk wilayah pedesaan terbelakang dengan struktur ekonomi pertanian tradisional atau subsisten ini penekanannya berbeda dengan wilayah maju (modern) dengan struktur ekonomi industri maju. Potensi sumberdaya manusia di wilayah maju menitik beratkan pada kemampuan sumberdaya manusia yang mampu menguasai teknologi dan mengkoordinasikan modal untuk memproduksi barang komoditas yang lebih murah daripada negara lain, atau negara lain tidak mampu memproduksi suatu komoditas untuk pasar global atau pasar dalam negeri. Sedangkan potensi sumberdaya manusia di wilayah pedesaan terbelakang menitik beratkan pada keterampilan historis dan kultur masyarakat untuk dikembangkan. Dengan Keterampilan SDM di suatu wilayah karena pengalaman historis mampu memproduksi suatu barang komoditas yang mampu bersaing dengan wilayah lain, misalnya : masyarakat Jepara unggul dalam memproduksi mebel ukir, masyarakat Ceper

dan Tegal unggul dalam memproduksi perkakas dengan cor logam, masyarakat Pedan dan Majalaya unggul dalam produksi kain tenun, masyarakat Bali mempunyai kultur yang mampu mendatangkan turis domestik maupun asing, dan hampir seluruh pesisir pantai di Sulawesi unggul di sektor penangkapan dan budidaya ikan-ikan laut.

Termasuk juga pengalaman histories dan kultur masyarakat di sini adalah jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) sumberdaya manusia, misalnya masyarakat Sumatera Barat, Wonogiri, dan Madura yang suka merantau sebagai pedagang/wirausaha. Sebagai wirausaha ini akan memupuk jiwa *entrepreneurship* yang mampu memanfaatkan peluang usaha setiap perkembangan situasi dalam masyarakat. Pada gilirannya sebagian dari mereka bisa menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

Dalam wilayah terbelakang ini peranan Pemerintah Daerah sangat besar dalam mengembangkan basis ekonomi rakyat di wilayahnya, baik penyediaan prasarana umum, fasilitas sosial, maupun pengembangan produk unggulan daerah melalui pembinaan industri/usaha kecil-menengah (IKM/UKM) khususnya yang mengolah sumberdaya alam yang menjadi unggulan daerah. Pemerintah Daerah juga memprogramkan memberikan bantuan teknis dan permodalan kegiatan basis ekonomi rakyat misalnya daerah pertanian memberdayakan para petani, daerah pesisir laut memberdayakan para nelayan. Karena UKM/IKM dan para petani di wilayah terbelakang ini belum mampu eksis dalam proses era globalisasi

Pengertian dan Kebijakan Pengembangan Masyarakat Wilayah Pesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sepanjang pantai/pesisir laut, kebanyakan masyarakatnya hidup sebagai nelayan, petambak, pemasang bagan di laut dangkal atau petani rumput laut dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumberdaya kelautan. Strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan yang mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Di lain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat pesisir secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan permasalahan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

1. Pendekatan struktural.

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik.

Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat pesisir mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat setempat untuk ikut serta melindungi sumber daya laut dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- a. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pada sumberdaya laut. Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya laut adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat pesisir. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan (sustainable). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara perekonomian masyarakat pesisir, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk menjaga dari kerusakan lingkungan.
- b. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pesisir terhadap sumberdaya ekonomi. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pesisir terhadap sumberdaya ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat pesisir dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan perkreditan.
- c. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pesisir terhadap proses pengambilan keputusan. Keberhasilan pengembangan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumberdaya laut dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat pesisir akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya laut. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda, yaitu: Pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat pesisir yaitu kesejahteraan.

Pelibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan dari atas ke bawah (*top down planning*). Pada tingkat perencanaan masyarakat harus

dilibatkan dalam penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya. Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Di lain pihak, *top down planning* diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.

- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pesisir terhadap informasi. Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumberdaya lautnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi sumberdaya laut serta wilayah pesisir dan laut. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini tergantung secara ekonomis pada sumberdaya laut, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat di wilayah itu.
- e. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam perlindungan wilayah dan sumberdaya laut, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat pesisir untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- f. Pengembangan jaringan pendukung. Pengembangan koordinasi jaringan pendukung tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (*stakeholders*), baik jaringan pemerintah, masyarakat pesisir maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat mendorong terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem dialog antar instansi terkait tersebut dengan masyarakat. Kebiasaan mengkomunikasikan gagasan dan rencana kegiatan masing-masing instansi merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan. Untuk itu, pelembagaan sistem koordinasi antar *stakeholders* perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi di lingkungan pemerintah (Moh. Manshur Hidayat dan Surochim As, 2003).

2. Pendekatan non struktural

Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal (dalam hal ini masyarakat pesisir) dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya laut di sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya laut dan wilayah pesisir adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumberdaya laut. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya laut tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat pesisir dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu:

- a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan. Pengetahuan dan wawasan lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat pesisir tentang lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat pesisir dengan pemanfaatan sumberdaya laut dan pengawasannya dibanding dengan masyarakat di luar wilayah pesisir. Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparatatur dusun, desa, dan kecamatan serta masyarakat luas.
- b. Pengembangan keterampilan masyarakat pesisir. Peningkatan keterampilan praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat pesisir dan jajaran pemerintah di tingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya laut secara efisien, dan keterampilan tentang upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan keterampilan tersebut akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir dan laut.
- c. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir diperlukan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya kemampuan dan peluang masyarakat pesisir untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau lembaga sosial. Sasaran utama program ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.

- d. Pengembangan kualitas diri. Peningkatan kualitas manusia diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumberdaya laut yang tidak efisien. Program pengembangan kualitas manusia ini selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan juga dengan cara membentuk kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, baik di lingkungan desa pantai/pesisir maupun di luar, bahkan antar wilayah. Penyiapan tenaga kerja untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan wilayah lain di sekitarnya perlu dilakukan secara proaktif dengan dilandasi oleh pandangan jauh ke depan.
- e. Peningkatan motivasi masyarakat pesisir untuk berperan-serta. Motivasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta mereka secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, upaya pelibatan masyarakat dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan terus. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan aspek-aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi mempunyai arti yang strategis untuk mendorong masyarakat melibatkan diri dalam upaya perlindungan sumberdaya alam.
- f. Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat pesisir. Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pesisir menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.

Dengan demikian strategi pengembangan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kemandirian daerah sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pesisir dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang dengan tujuan yang menitikberatkan pada: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; (2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan; (3) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan; dan (4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan. Keempat tujuan jangka panjang tersebut hanya mungkin dicapai bila disusun dan ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara mantap dan berkesinambungan (Hidayat dan Surochim, 2003).

Pengertian dan Model Klaster Industri

Klaster industri dapat didefinisikan sebagai “jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait yaitu (industri inti (*core industries*) yang menjadi fokus perhatian industri pendukungnya (*suporting industries*) dan industri terkait (*related industries*), pihak/ lembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani (*bridging institutians*) misalnya broker dan konsultan, serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*)”. Atau secara singkat klaster industri adalah “kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/ peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis”.

Istilah inti, pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam klaster tertentu dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu. Para pelaku (*stakeholders*) dalam suatu klaster industri biasanya dikelompokkan kepada industri inti, industri pemasok, industri pendukung, industri terkait, dan pembeli, serta institusi pendukung (non industri). Beberapa pengertian elemen-elemen dalam klaster industri antara lain adalah sebagai berikut:

1. Industri inti: (a) industri yang merupakan perhatian atau tematik dan biasanya dijadikan titik masuk kajian, dapat merupakan sentra industri, (b) industri yang maju (dicirikan dengan adanya inovasi).
2. Industri pemasok: (a) industri yang memasok dengan produk khusus, (b) pemasok yang khusus (spesialis) merupakan pendukung kemajuan klaster. Yang dipasok antara lain: bahan baku, bahan tambahan (penolong), dan aksesori.
3. Pembeli: (a) dapat berupa distributor atau pemakai langsung, (b) pembeli yang sangat “penuntut” merupakan pemacu kemajuan klaster. Pembeli antara lain terdiri dari: distributor, pengecer, pemakai langsung.
4. Industri pendukung: (a) meliputi jasa barang, termasuk layanan pembiayaan (bank, modal ventura), (b) jasa (angkutan, bisnis distribusi, konsultan bisnis), (c) infrastruktur (jalan raya, telekomunikasi, listrik), (d) peralatan (permesinan, alat bantu), (e) jasa pengemasan, (f) penyedia jasa pengembangan bisnis (*business development services provider (BDSP)*)
5. Industri terkait: (a) industri yang menggunakan infrastruktur yang sama dengan industri inti, (b) industri yang menggunakan sumberdaya dari sumber yang sama. Istilah “terkait” di sini agak berbeda dengan yang dipakai sehari-hari. Industri terkait tidak berhubungan bisnis secara langsung, misalnya bersifat kompetitor, komplementer, dan substitusi.

6. Lembaga pendukung: (a) lembaga pemerintah yang berupa penentu kebijakan atau melaksanakan peran publik, (b) asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota (c) lembaga pengembang swadaya masyarakat yang bekerja pada bidang khusus yang mendukung (Widodo dkk 2003).

Segi kelebihan dari pengembangan klaster industri ini adalah bahwa pengembangan suatu industri yang dinyatakan sebagai produk unggulan daerah atau yang masih potensial menjadi produk unggulan daerah bila dikembangkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan klaster industri, kemungkinan berhasil lebih besar daripada program pengembangan tanpa menggunakan model klaster industri, karena dalam proses membangun suatu klaster industri akan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait, baik pelaku usaha inti, lembaga-lembaga non pemerintah nir laba, lembaga pendukung, pelaku usaha sebagai industri pendukung, pembeli hasil produksi, dan seluruh dinas-dinas Pemda di mana masing-masing dinas tidak ada ego unit kerja. Kelebihan lainnya adalah bahwa semua pelaku usaha baik sebagai industri inti, pemasok, pedagang/pembeli, dan industri pendukung. Semuanya mendapatkan informasi yang lebih akurat dan memperluas wawasan masing-masing pelaku usaha, Sehingga masing-masing pihak akan bertindak atau bersikap proporsional.

Pengembangan industri kecil/menengah yang menjadi basis ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah dengan menggunakan pola klaster industri akan lebih mudah berhasil apabila diditangani atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setempat, karena Pemerintah Daerah merupakan pemegang otorisasi dan koordinasi terhadap dunia usaha, masyarakat, dan lembaga masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau kajian tentang “Pengembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Barru Melalui Klaster Penangkapan Ikan Laut” ini dilakukan tahap awal dengan studi literatur atau perputakaan. Kemudian melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dengan menyelenggarakan beberapa kali forum grup diskusi (*forum group discussion*) dengan beberapa pakar di bidang klater industri, pejabat-pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan pelaku usaha di bidang perikanan laut. Di antaranya Ketua Bappeda, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian. Masing-masing pejabat pemerintah mempresentasikan keahliannya dalam grup diskusi dimaksud, dengan biaya anggaran kegiatan dari BPPT. Hasil kegiatan forum grup diskusi dimaksud adalah kesepakatan antara Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, pelaku usaha, dan team dari BPPT untuk mengembangkan klaster penangkapan ikan laut di wilayah pesisir Kabupaten Barru.

PROFILE KABUPATEN BARRU (PROPINSI SULAWESI SELATAN) SEBAGAI WILAYAH PESISIR LAUT

Kabupaten Barru termasuk Propinsi Sulawesi Selatan di pesisir Selat Makasar Pulau Sulawesi. Batas-batas wilayah Kabupaten Barru adalah sebelah Utara: Kabupaten Pare-Pare, sebelah Selatan: Kabupaten Pangkajene, sebelah Barat: Selat Makasar, dan sebelah Timur: Kabupaten Watansoppeng. Luas daratan wilayah Kabupaten Barru 119.166,61 ha, terdiri dari pertanian tanaman pangan 13.288,15 ha, tanah kering 18.986,97 ha, tambak 2.555,61 ha, kebun 16.070,30 ha, padang rumput 14.081,95 ha, hutan 67.350,86 ha, pemukiman 2.577,52 ha, dan pesisir panatai sepanjang 87 km.

Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Barru sebesar Rp. 497.068,43 juta dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 3.227,55 juta. Sektor ekonomi yang terbesar dari Kabupaten Barru ini dari sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) sebesar Rp. 251.184,06 juta (56,65 %). Khususnya sub sektor perikanan laut sebesar Rp.100.257,88 juta (22.61 %). Sektor ekonomi yang ke dua di bawah pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan adalah sektor perdagangan dan restoran yaitu sebesar Rp. 67.327,88 juta (20,19 %). Lihat Tabel I: PDRB Kab. Barru Tahun 2000 - 2004.

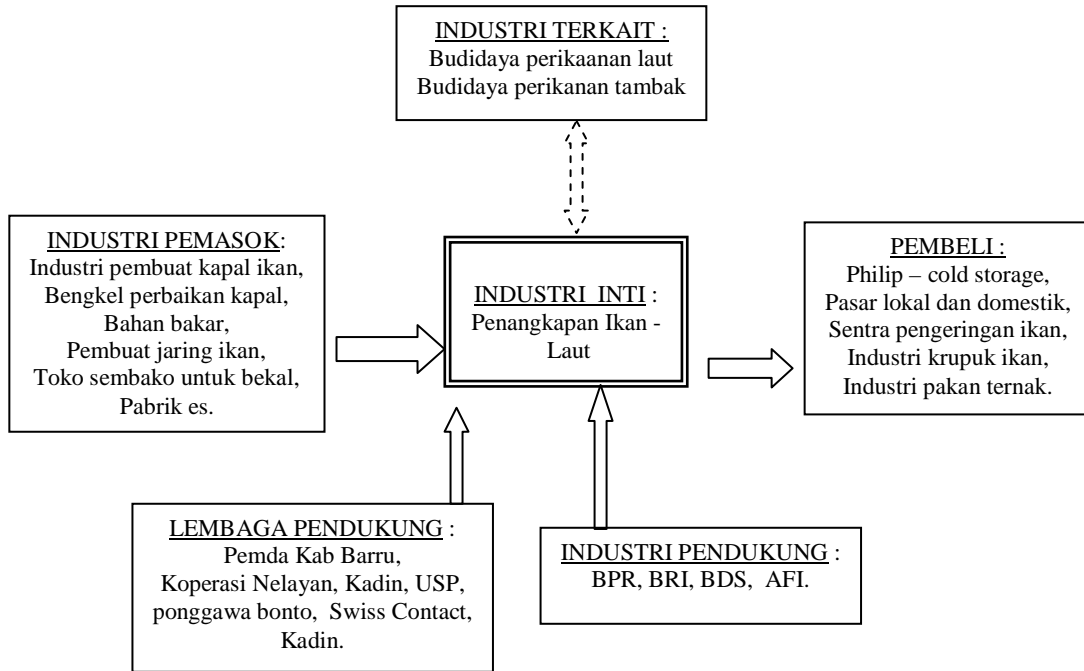
Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2002 berjumlah 154.008 orang. Proporsi penduduk yang hidup dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan \pm 52,65%. Sektor perdagangan \pm 20,19%. Sektor jasa \pm 13,96%. Dan sisanya hidup di sektor perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, industri, dll. (Bappeda Kabupaten Barru, "PDRB 2002-2004") Sub sektor Perikanan terdiri dari: (a) penangkapan ikan di laut (b) budidaya ikan, udang, dan rumput laut di laut, dan (c) Budidaya tambak udang dan bandeng. Karena sebagian besar penduduk di wilayah ini hidup dari sektor pertanian dan perikanan laut, maka sektor pertanian dan perikanan laut ini mendapatkan skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk dikembangkan lebih dahulu sebagai basis ekonomi rakyat atau tulang punggung perekonomian masyarakat. Menyusul kemudian sektor perdagangan, perkebunan rakyat, peternakan, agroindustri dan industri kecil/menengah yang menunjang sektor pertanian dan perikanan, karena menghasilkan komponen terbesar dalam PDRB.

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BARRU MELALUI KLAS TER PENANGKAPAN IKAN LAUT

Pengembangan Klaster Penangkapan Ikan Laut

Dalam temu bisnis antara team BPPT, Pemda Kabupaten Barru, dan para pelaku usaha, telah diputuskan untuk mengembangkan klaster pertambakan bandeng dan udang, klaster

budidaya ikan dan rumput laut di laut, dan kluster penangkapan ikan di laut. Dalam penulisan di makalah ini penulis hanya menyoroti kluster penangkapan ikan di laut. Kolaborasi pihak-pihak yang dapat mendukung keberhasilan model kluster penangkapan ikan laut di wilayah Kabupaten Barru sebagaimana terpetakan dalam gambar 1, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber : laporan kerja-sama antara BPPT dengan Pemda Kab. Barru.

Gambar 1
Kluster Penangkapan Ikan Laut Kabupaten Barru

1. Dalam analisis ini penangkapan ikan laut merupakan industri inti. Penangkapan ikan laut di Kabupaten Barru masih berupa jenis usaha perseorangan yang tersebar di wilayah pesisir laut Kabupaten Barru. Teknologi penangkapan ikan masih menggunakan peralatan sederhana seperti: perahu dayung, perahu tempel, dan kapal dengan berat bobot mati (*dead weight*) yang kecil, sehingga pada umumnya tidak berani menangkap ikan sampai ke laut lepas. Para pemilik kapal dimaksud mempekerjakan buruh-buruh melayan.
2. Industri pemasok terdiri dari industri-industri: pembuat kapal ikan, bengkel perbaikan kapal, bahan bakar, pembuat jaring ikan, toko sembako untuk bekal, dan pabrik es.

Untuk perahu dayung dan tempel, para nelayan sudah mampu memperbaiki sendiri kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sedangkan perbaikan kapal hingga kini masih sulit ditemui di wilayah Kabupaten Barru. Kebutuhan jaring ikan dapat mudah didapat di toko-toko penjual peralatan nelayan. Akan tetapi nelayan lebih senang membuat sendiri di kala angin barat atau oleh keluarga nelayan itu sendiri. Pasokan pabrik es masih dirasa kurang dibandingkan kebutuhan masyarakat nelayan. Sehingga kadang-kadang menjadi kendala bagi nelayan yang akan melaut.

3. Pembeli hasil tangkapan ikan adalah pasar kebutuhan daerah Kabupaten Barru dan sekitarnya. Untuk jenis ikan dengan berat tertentu dapat dijual kepada perusahaan Philip Cold Storage. Di samping itu di wilayah kabupaten Barru ini terdapat sentra industri kecil/skala mikro pengeringan ikan, Industri krupuk ikan, dan Industri pakan ternak yang membeli hasil tangkapan ikan para nelayan dimaksud.
4. Industri Pendukung antara lain Bank BRI, BPR, Business Development Services (BDS) yang aktif melakukan pendampingan dan mencarikan pemasaran, dan Asistence of Financial International yang bertugas mencarikan pasar untuk jenis produk-produk tertentu. Pada umumnya para nelayan mengalami kendala dalam akses pada perbankan karena keharusan penyertaan jaminan pinjaman. Akibatnya para nelayan jatuh ketangan ponggawa bonto, yaitu orang yang memberikan modal kepada nelayan dengan persyaratan yang relatif berat bagi nelayan, sehingga kehidupan nelayan pada umumnya di bawah garis kemiskinan.
5. Industri Terkait dari klaster penangkapan ikan laut adalah budidaya perikanan laut dan budidaya perikanan tambak. Kedua industri ini menghasilkan ikan sejenis yang mempunyai pasar yang sama, di samping menghasilkan tanaman rumput laut. industri terkait ini bisa menjadi pesaing bila pasarnya terbatas, tetapi bisa juga menjadi pelengkap bila pembeli memerlukan komoditas ikan dalam jumlah besar.
6. Lembaga Pendukung terdiri dari beberapa dinas terkait yaitu Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Indag, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah Kabupaten Barru, BPPT, Kadinda, USP, dan Swiss Contact.

Analisis Klaster Penangkapan Ikan Laut

Pilihan klaster penangkapan ikan laut di wilayah Kabupaten Barru ini karena pertimbangan karakteristik dan keunggulan daerah, baik sumberdaya alamnya, kemampuan dan pengalaman historis sumberdaya manusia, kapabilitas masyarakat dan dunia usaha, produk unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan, maupun basis ekonomi rakyat, yaitu:

- a. Panjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Barru sangat panjang, yaitu 87 km di Selat Makasar. Sepanjang pantai memenuhi syarat untuk dibangun tempat pelelangan ikan (TPI).
- b. Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis dan sekitarnya sudah terkenal sejak jaman dulu hidup sebagai pelaut yang mampu berlayar hingga ke beberapa penjuru dunia.

- c. Jumlah masyarakat yang hidup sebagai nelayan sangat banyak yaitu: 17.318 (orang). Dengan jumlah ini maka kegiatan penangkapan ikan laut merupakan basis ekonomi rakyat bagi masyarakat pantai, dengan nilai produksi sebesar Rp.100.257,88 juta. Nilai produksi yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang jumlah keseluruhannya hanya sebesar Rp.150.826,16 juta.
- d. Kapasitas produksi ikan belum jenuh untuk ditingkatkan. Apabila produksi tangkapan ikan masyarakat ditingkatkan, penjualannya masih dapat diserap oleh pasar domestik.
- e. Ikan laut bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan kebutuhan pokok lauk sehari-hari, sehingga konsumsi ikan sangat tinggi. Hal ini menunjang penghidupan para nelayan dan budidaya ikan laut.

Dengan pilihan klaster penangkapan ikan laut ini diyakini oleh para pihak terkait (*stakeholder*) sebagai program yang strategis dan lebih efektif karena seluruh para pihak terkait (*stakeholder*) dilibatkan. Masing-masing pihak pemasok dan pembeli saling mengetahui posisi dan daya tawarnya masing-masing, sehingga tidak akan bersikap yang merugikan pihak lain atau menawarkan barang atau jasanya yang dapat diterima oleh pasar.

Di samping faktor-faktor yang menjadi keunggulan di atas, terdapat juga beberapa faktor yang menghambat pengembangan klaster penangkapan ikan laut di wilayah Kabupaten Barru, antara lain adalah:

- a. Pendidikan para nelayan relatif masih rendah, sehingga pada umumnya masih tradisional, kurang mampu menyerap informasi sehingga sulit mengembangkan atau meningkatkan usahanya. Akibatnya selama hidupnya selalu di bawah garis kemiskinan.
- b. Lebih susah lagi para buruh nelayan yang bekerja pada pemilik kapal dengan upah rendah, karena posisi tawar antara buruh nelayan dengan pemilik kapal ikan masih lemah, karena jumlah kapal nelayan dalam masyarakat belum memadai. Di lain pihak buruh nelayan yang ingin pindah menjadi nelayan dengan perahu sendiri tidak mampu membeli perahu.
- c. Musim angin barat selama 4 bulan yang mengurangi aktivitas nelayan. Artinya para nelayan bekerja selama 8 bulan untuk menghidupi keluarga selama satu tahun. Bagi para nelayan yang kurang mengantisipasi musim angin barat ini akan mengalami kesulitan pada saat musimnya tiba.
- d. Mutu produk belum memadai penangannya.

Melihat kelemahan-kelemahan di atas, maka pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan agar mampu meningkatkan kualitas dari nelayan tradisional menjadi nelayan rasional, meningkatkan mutu produk hasil tangkapan ikan, di samping bantuan keuangan untuk membeli perahu bagi buruh nelayan dan biaya operasional bagi nelayan kecil untuk menghindari rentenir ponggawa bonto.

Prospek pengembangan penangkapan ikan laut di wilayah ini sangat baik karena terdapat lembaga dan industri penunjang, misalnya: (a) adanya eksistensi lembaga pemerintah yaitu Sekolah perikanan, DKP, penyuluh, dll; b) adanya KADINDA, koperasi, USP; (c) adanya perusahaan expotir ikan; (d) sudah ada industri penunjang dan industri hilir yaitu: pabrik es, industri krupuk ikan, pabrik pakan ternak, industri pengolah ikan; *cold storage*, bengkel mesin dan industri pembuatan perahu/kapal ikan.

Sebagai kunci pokok keberhasilan kluster penangkapan ikan laut ini adalah tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam upaya meningkatkan partisipasi pihak-pihak terkait (*stakeholder*) agar bisa berkolaborasi dalam jaringan kluster penangkapan ikan laut dimaksud sehingga masing-masing bisa saling menunjang.

Di samping terdapat beberapa faktor luar yang menunjang terciptanya prospek baik bagi kluster penangkapan ikan laut di atas, terdapat juga beberapa faktor luar kluster penangkapan ikan laut yang menjadi tantangan, antara lain adalah: (a) Adanya penangkapan ikan dengan bom dan racun cianida; (b) Belum banyak usaha *cold storage* beroperasi di wilayah Kabupaten Barru; (c) Kapasitas Industri pengolahan ikan dan pengeringan ikan belum besar; (d) Tingkat bunga bank dan ponggawa bonto cukup tinggi; (e) Harga ikan kurang layak (rendah); (f) Rantai tata niaga panjang; (e) Pabrik tepung ikan tidak ada; dan (f) Perusahaan dok kapal tidak ada.

Melihat tantangan-tantangan di atas, maka pemerintah daerah perlu mendorong tumbuhnya perusahaan dok kapal dan perusahaan pembuatan tepung ikan atau sejenisnya yang menggunakan ikan laut sebagai bahan baku industrinya. Bila perlu Pemerintah Daerah mendirikan industri pengolahan ikan sebagai program percontohan agar dapat ditiru oleh masyarakat.

Analisa SWOT

Analisa Keunggulan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threath*) atau analisa SWOT sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis SWOT

Keunggulan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>),
<ul style="list-style-type: none"> • Panjang pesisir pantai di wilayah Kabupateen Barru sangat panjang, yaitu 87 km di Selat makasar. • Jumlah masyarakat yang hidup sebagai nelayan sangat banyak yaitu 17.318 orang. • Ikan laut bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan lauk pokok yang harus tersedia setiap hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan para nelayan relatif masih rendah. • Posisi tawar antara nelayan dengan pemilik kapal ikan masih lemah. • Angin barat selama 4 bulan yang mengurangi aktivitas nelayan. • Mutu produk belum memadai penangannya. • Pabrik tepung ikan tidak ada. • Dok kapal / perahu tidak ada.
Peluang (<i>opportunity</i>)	Tantangan (<i>threath</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya eksistensi lembaga pemerintah (Sekolah perikanan, DKP, penyuluh, dll). • Adanya kadin, koperasi, USP, ponggawa bonto. • Adanya perusahaan expotir ikan. • Kapasitas produksi ikan belum jenuh untuk ditingkatkan. • Sudah ada industri penunjang/hilir: <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik es - Industri krupuk ikan - Pabrik pakan lemak tersedia - Industri pengolah ikan - Cold storage - Bengkel mesin - Adanya pembuatan industri perahu/kapal ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya penangkapan ikan dengan bom dan racun. ▪ Belum banyak usaha cold storage beroperasi di wilayah Kab. Baru. ▪ Kapasitas Industri pengolahan ikan dan pengeringan ikan belum besar. ▪ Jasa bunga bank dan ponggawa bonto cukup tinggi. ▪ Harga ikan kurang layak (rendah). ▪ Rantai tata niaga panjang.

Sumber: Pemda Kabupaten Barru

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Dengan berlakunya otonomi daerah yang dimulai awal tahun 2001 ini, di mana setiap daerah kabupaten diberikan wewenang atau otoritas membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi sumberdaya alam, potensi keunggulan daerah, dan kemampuan sumberdaya manusianya, maka sistem pembangunan ekonomi secara otomatis telah berubah dari sistem pembangunan sektoral menjadi sistem pembangunan wilayah.
2. Agar tidak terjebak pada keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini maka seyogyanya pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakannya dan skala prioritas pembangunannya harus hati-hati dengan memperhatikan dan mendahulukan pembangunan ekonomi yang menjadi basis ekonomi rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang menjadi bagian terbesar mata pencaharian masyarakat setempat di wilayah masing-masing.
3. Kabupaten Barru yang kondisi alamnya merupakan pesisir pantai laut maka sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan penangkap ikan di laut, budidaya ikan dan rumput laut, serta budidaya tambak bandeng, udang, dan juga rumput laut, maka basis ekonomi rakyatnya adalah: budidaya tambak dan laut, serta nelayan penangkap ikan. Sedangkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi rakyat untuk masyarakat pedesaan di pedalaman.
4. Salah satu pelaksanaan program pengembangan basis ekonomi rakyat yang dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Barru baru-baru ini adalah pengembangan kluster penangkapan ikan laut. Segi keunggulan sistem kluster ini adalah semua dinas-dinas dan Bappeda di lingkungan Kabupaten Barru berkolaborasi positif untuk pengembangan usaha masyarakat khususnya penangkapan ikan laut. Bahkan semua pihak stake-holder yang ada kaitannya dengan usaha penangkapan ikan laut tersebut diajak bermusyawarah, sehingga masing-masing tahu posisinya dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Khususnya perusahaan pemasok dan pembeli pada posisi tawar yang seimbang.

Implikasi Kebijakan

1. Oleh karena kebijakan otonomi daerah ini merupakan paradigma baru dan koreksi besar-besaran atas kebijakan pemerintah dalam sistem pembangunan, maka diperlukan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka pendek dan panjang yang sangat jelas dan konkrit di masing-masing wilayah. APBD setiap tahun harus mencerminkan sasaran pembangunan di tiap-tiap tahapan pembangunan.
2. Yang tidak kalah penting sebagai persyaratan untuk keberhasilan pembangunan dengan sistem pembangunan wilayah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ialah harus adanya perubahan paradigma atas mental aparat pemerintah daerah yaitu dari mental

birokrat yang hanya bekerja atas perintah dari atasan, menjadi jiwa inovator atau jiwa entrepreneurship yang mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam masyarakat, berjiwa wirausahawan yang mampu eksis berusaha setiap peluang usaha yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian proses transformasi dari wilayah terbelakang menjadi maju akan berjalan lebih cepat.

3. Apabila telah terpenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, maka mengembangkan masyarakat pedesaan hanya bisa berjalan dengan baik apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Barru beserta aparat pemerintah daerahnya secara terus menerus mendampinginya secara kolaboratif masing-masing bersama dinas dan *stakeholder* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widodo, Iis Sumiati, dan Rayendra P, 2003. "*Pengembangan Kluster Industri Unggulan Daerah*". P2KT PUD-PKM, Kedepatian Bid. PKT, BPPT.
- Alkadri, Dodi S. Riyadi, Muchdie, Siswanto S, dan Fathoni M, 1999. "*Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*". Dit. KTPW-BPPT.
- Asmenko Wasbangpan Bid. Kelembagaan, 1999. "*Seminar Teknologi, Ekonomi, dan Pemerintah Daerah*". di jakarta. 9 Agustus 1999.
- Bappeda Kabupaten Barru 2000-2004. "*PDRB Kabupaten Barru 2000-2004*".
- Bungaran Saragih, 1999. "*Prioritas Dan Strategi Pembangunan Kembali Ekonomi Indonesia Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Tekonologi*", dalam Prosiding Seri Diskusi/Seminar Teknologi, Ekonomi, dan Otonomi Daerah, Jakarta.
- Edgar M. Hoover, 1975. "*An Introduction to Regional Economics*". 2nd Alfred A. Knopf, New York.
- Hari Kartono, Sugeng Rahardjo, dan I Made Sandy, 1989. "*Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*". Penerbit: Geo. FMIPA, UI Jakarta.
- Harry W. Richardson, 1972. "*Regional Economics*". Redwood Press Limited, London.
- Kristiadi, J.B., 1992. "*Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan Daerah*". Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 2, PAU-IS-UI, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laode Ida, 1992. "*Hak Kelola Rakyat Lokal dalam Otonomi Daerah*". Kompas, 19 Juli.

- Lutfi I. Nasution, 1992. “*Beberapa Hasil Kajian Penerapan Konsep Dan Metode Pengembangan Wilayah Wilayah Dalam Pembangunan di Indonesia*” dalam Seminar Pentaloka Managemen Area – Deptan Prof. NTT, 20-26 April 1992.
- Lutfi I. Nasution & Ernan Rustiadi, 1990. “*Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Melalui Industrialisasi Pedesaan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*”. Seminar tentang Pembangunan Desa Secara Terpadu untuk Pemerataan.
- Lutfi I. Nasution, 1989. “*Tinjauan Umum Atas Beberapa Model Pembangunan Wilayah*”. Lokakarya Pengembangan Wilayah Terpadu, oleh Univ. Nusa Cendana, NTT, 27-30 Nopember.
- Moh. Manshur Hidayat dan Surochim As, Peneliti pada Link-Ridev Institute, 2003. “*Pokok-Pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam mendorong Kemandirian Daerah*”. Jurnal Ekonomi Rakyat, Surabaya.
- Mubyarto, 1989. “*Pengantar Ekonomi Pertanian*”. Edisi III, LP3ES, Jakarta.
- Peter Nijkamp, 1986. “*Handbooks of Regional and Urban Economics*”. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.
- Saparudin, Ruki Savianto, Agus Widodo, Tatang A.Taufik, 2006. “*Pendekatan Klaster Industri Dalam Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Sumedang*”. diterbitkan oleh Pusat PKTPUDPKM, PKT, BPPT, Jakarta.
- Sugeng Budiharsono, 1989. “*Perencanaan Pembangunan Wilayah*”. PAU-Ekonomi – UI, Depok.
- T. Hanafiah, 1985 “*Beberapa Aspek Dalam Masalah Perencanaan Wilayah*”. Majalah Zona, Edisi 01 Juni, HIPIWI Bogor.
- Godaro MP., 1991. “*Economic Development In The Third Word*”. 3rd 1985, Terjemahan Burhanuddin Abdullah, MA, Erlangga, Jakarta.